

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, BELANJA MODAL DAN  
UKURAN PEMERINTAH TERHADAP PENGENDALIAN INTERN  
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DAN  
KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019)**

**Devi Rahma Dini<sup>1)</sup>, Desmiyawati<sup>2)</sup>, Vera Oktari<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : [devirahmadini1997@gmail.com](mailto:devirahmadini1997@gmail.com)

*The Influence of Economic Growth, Capital Expenditure and Size Of Local  
Government of Internal Control*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of economic growth, capital expenditure and size of local government of internal control. The data used in this study are secondary data. The method used for sample selection was purposive sampling. The number of samples in this study were 66 companies. Hypothesis testing in this study was carried out using the t statistical test. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis the statistical product and service solution (SPSS) version 20.0 for windows data processing software program. The results of this study indicate that economic growth and size of local government have a significant effect of internal control. Meanwhile, capital expenditure have no effect of internal control.*

*Keyword : Internal Control, Economic Growth, Capital Expenditure and Size of Local Government.*

**PENDAHULUAN**

Sejak adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Adanya wewenang ini menunjukkan adanya kepercayaan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Menurut Simanjuntak (2016), tujuan otonomi daerah adalah untuk mengatur daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai

dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Kecurangan (*fraud*) dalam organisasi baik itu *profit oriented* maupun *non profit oriented* biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern yang ada didalam organisasi tersebut. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern ini mengakibatkan munculnya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurut Wilopo (2016) lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan, dan faktor keduanya adalah diabaikannya

sistem pengendalian intern yang telah ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan bahwa, pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara khusus SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada penelitian Eko Adi Saputro (2015), menyatakan dari total 127 kasus kelemahan pengendalian intern di Carolina Utara AS sebagian besar (42%) terjadi di lembaga pemerintah. Survey KPMG menyatakan dimana sebagian besar kecurangan (33%) terdeteksi karena adanya pengendalian intern.

Kasus akibat lemahnya pengendalian internal yaitu: Pada tahun 2016, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap aturan senilai total Rp19,48 triliun dan hal ini jelas membuat kerugian. Nilai itu mencakup 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian internal dan 6.210 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi di

pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lain. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016. Lalu pada tahun 2017, BPK menemukan 14.997 permasalahan keuangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan selama semester 1 tahun 2017. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun. Lalu, kasus pengendalian intern di wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Riau, yaitu: Pada tahun 2015, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan dalam penyusunan laporan keuangan. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam temuan BPK RI, menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Siak. Dan pada tahun 2017, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau ditemukan penyimpangan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, baik melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2016, dan juga pada SKPD lainnya seperti

pada pos bagian umum Setda Bengkalis, cukup lumayan besar dan mengejutkan. Hasil audit pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 29 Mei 2017 lalu sesuai LHP BPK-RI, bernomor: 18 C/LHP/XVIII.PEK/05/2017, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya adalah penatausahaan keuangan atas Kas oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang diduga menyimpang sebesar Rp1. 213.498.501,00,- Bentuk penyimpangan lain juga diketahui pada kejadian kekurangan fisik dalam pekerjaan kegiatan proyek yang dibangun pada tahun 2016 lalu. Sementara itu, bentuk dugaan penyimpangan keuangan di Pemda Bengkalis pada satuan kerja.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian intern adalah pertumbuhan ekonomi (Martani dan Zaelani, 2011). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator atas keberhasilan pembangunan daerah. Organisasi nirlaba yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak (Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). Hal tersebut yang dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian internal.

Lalu, Belanja modal juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengendalian internal (Kristanto 2011). Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Semakin besar belanja modal yang tidak dimbangi dengan sistem pengendalian yang semakin baik maka akan banyak terjadi penyalahgunaan belanja modal sebagai objek korupsi. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset semakin tinggi.

Lalu, ukuran pemerintah daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengendalian internal. Ukuran dalam suatu organisasi memperlihatkan tingkatan aktivitas yang ada di dalamnya. Organisasi yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran kecil biasanya memiliki tingkat aktivitas yang rendah (Hartono 2014).

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2019)”**.

Rumusan permasalahan untuk penelitian ini adalah: (1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengendalian Intern? (2)

Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pengendalian Intern? (3) Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Pengendalian Intern?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui analisis pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Intern. (2) Untuk mengetahui analisis pengaruh antara Belanja Modal dan Pengendalian Intern. (3) Untuk mengetahui analisis pengaruh antara Ukuran Pemerintah Daerah dan Pengendalian Intern.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian intern adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Pengendalian intern menurut COSO (2013) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.

Menurut COSO (2013), tujuan pengendalian internal yaitu mencakup tiga hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi

operasi. (2) Tujuan-tujuan pelaporan. (3) Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2016:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah: (1) Menjaga kekayaan organisasi. (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (3) Mendorong efisiensi. (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Saputro (2015), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik.

### **Belanja Modal**

Menurut Halim dan Abdullah (2013), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Menurut Abdullah dan Halim (2013), alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melakukan pengadaan aset tetap. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Agar alokasi dari dana belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat tepat sasaran dan tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan

oleh pemerintah daerah bisa tercapai maka perlu adanya sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan atau kontrol harus diterapkan dalam rangka untuk meminimalisir anggaran belanja modal yang bocor sehingga merugikan keuangan daerah.

### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014). Menurut Saputro (2015), tolak ukur yang bisa dijadikan dasar untuk menunjukkan besar kecilnya suatu entitas atau perusahaan antara lain: total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan yang tergolong ke dalam ukuran besar pada umumnya memiliki aset yang besar pula, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Posisi arus kas memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar relatif lebih stabil tingkat keuangannya jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu tingkat kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada organisasi dengan ukuran besar cenderung lebih sedikit, hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem pengawasan yang baik.

### **Kerangka dan Hipotesis Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengendalian Internal**

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator atas keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah

organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Organisasi nirlaba yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak (Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). Hal tersebut yang dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Iin (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dengan pengendalian intern.

**H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengendalian Internal.**

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengendalian Internal**

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Semakin besar belanja modal yang tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang semakin baik maka akan banyak terjadi penyalahgunaan belanja modal sebagai objek korupsi. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset semakin tinggi.

Menurut Nurwati dan Trisnawati (2017), belanja modal berpengaruh terhadap pengendalian internal.

## **H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pengendalian Internal.**

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Internal**

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya total kekayaan pemerintah. Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Organisasi yang mempunyai ukuran besar diindikasikan memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu mengembangkan serta mengimplementasikan pengendalian intern dengan baik. Organisasi yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran kecil biasanya memiliki tingkat aktivitas yang rendah (Hartono 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Selvi Pratiwi (2019) menemukan bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengendalian intern.

### **H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Intern.**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau yang terdiri dari 10

Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota di Provinsi Riau yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia dengan periode 6 tahun pengamatan yaitu 2014-2019.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dan yang menjadi sampel adalah 66. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang berupa laporan kelemahan pengendalian intern yang sudah diaudit oleh BPK. Sumber data yang digunakan berdasarkan cara memperolehnya dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh melalui website BPK, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan mengambil data langsung ke kantor BPK RI.

Data yang digunakan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yang diakses langsung melalui website BPK, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

### **Sistem Pengendalian Internal**

Indikator pengukuran sistem pengendalian intern adalah dengan melihat ketidakhadiran kendali yang cukup dan dapat meningkatkan resiko dari salah saji dalam laporan keuangan (Saputro, 2015).

### **Sistem Pengendalian Internal = Jumlah Temuan Kasus KPI**

#### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB } t_1 - \text{PDRB } t_0}{\text{PDRB } t_0} \times 100\%$$

### **Belanja Modal**

Variabel belanja modal diukur dengan menjumlahkan macam-macam jenis belanja modal tersebut.

**Belanja Modal = Ln (Belanja Modal)**

**Ukuran Pemerintah Daerah**

Proksi ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi populasi penduduk Maka pada penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$UPD = \frac{\text{Pendapatan (pusat + daerah)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari : analisis deskriptif, uji klasik, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, uji asumsi klasik dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dan analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1 : Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERTUMBUHAN EKONOMI	66	4.8520	21.7823	14.3430	3.95410
BELANJA MODAL	66	-8.9882	6522.07	173.581	815.638
UKURAN PEMERINTAH DAERAH	66	0.0001	1167308	15603.7	120134.3
PENGENDALIAN INTERN	66	0.90909	0.757575	0.81439	0.042911
Valid N (listwise)	66				

Sumber : Data Olahan, 2020

**Hasil Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dapat dilihat dari tabel *kolmogorov-smirnov* seperti

yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2 : Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		PERTUMBUHAN EKONOMI	BELANJA MODAL	UKURAN PEMERINTAH DAERAH	PENGENDALIAN INTERN
N		66	66	66	66
Normal Parameter sa, b	Mean	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
	Std. Deviation	.04007227	.04007227	.040072270	04007227
Most Extreme Differences	Absolute	.103	.103	.103	.103
	Positive	.103	.103	.103	.103
	Negative	-.063	-.063	-.063	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		1.010	1.010	1.010	1.010
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259	.259	.259	.259

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, terlihat nilai signifikansi .259 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

**Hasil Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan VIF. Multikolonieritas tidak terjadi bila nilai *tolerance value* diatas 0,1 atau nilai VIF dibawah 10. Hasil uji multikolonieritas disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficientsa		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PERTUMBUHAN EKONOMI	.878	1.139
BELANJA MODAL	.845	1.183
UKURAN PEMERINTAH DAERAH	.976	1.024

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara variabel-variabel independen yang diteliti.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik pada *scatterplot* membentuk pola tertentu berarti regresi mengalami gangguan. Sebaliknya jika diagram pencar tidak membentuk suatu pola tertentu (menyebar) berarti regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot* dibawah ini:

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedestisitas**

Descriptive Statistics		
VARIABEL	Sig	Keterangan
PERTUMBUHAN EKONOMI	0.81	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
BELANJA MODAL	0.934	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
UKURAN PEMERINTAH DAERAH	0.297	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel diatas, semua variabel bebas mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi pertama yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu Utang Usaha sebagai variabel dependen dengan Kualitas Informasi Akuntansi dan Profitabilitas sebagai variabel independen.

**Tabel 5 : Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.914	.020		94.379	.000
	PERTUMBUHAN EKONOMI	.014	.005	.296	2.865	.005
	BELANJA MODAL	.001	.002	.049	.467	.642
	UKURAN PEMERINTAH DAERAH	.005	.002	.265	2.335	.022

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

### Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.538 <sup>a</sup>	.290	.228	.0389454157079

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 29% yang berarti 29% variabel dependen Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah. Sedangkan sisanya (100% - 29% = 71%) dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Dari hasil pengujian hipotesis pertama pada tabel 5 diketahui

memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0.005 < 0.05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan **hipotesis pertama diterima**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator atas keberhasilan pembangunan daerah. Laju pertumbuhan dijadikan ukuran kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan, dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani In (2013) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dengan pengendalian intern.

#### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Sistem Pengendalian Intern**

Dari hasil pengujian hipotesis kedua pada tabel 5 diketahui memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0.0642 > 0.05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan **hipotesis kedua ditolak**, yaitu Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern. Hal ini mengindikasikan bahwa

kenaikan dan penurunan belanja modal tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern karena belanja modal tidak dapat mendeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya pengendalian intern.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selvi Pratiwi (2019) yang menyatakan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern.

#### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Sistem Pengendalian Intern**

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga pada tabel 5 diketahui memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0.022 < 0.05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan **hipotesis ketiga diterima**, yaitu Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya total kekayaan pemerintah. Ukuran pemerintah daerah diprosikan dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Organisasi yang mempunyai ukuran besar diindikasikan memiliki kemampuan

ekonomi sehingga mampu mengembangkan serta mengimplementasikan pengendalian intern dengan baik. Ukuran dalam suatu organisasi juga memperlihatkan tingkatan aktivitas yang ada di dalamnya. Organisasi yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran kecil biasanya memiliki tingkat aktivitas yang rendah (Hartono 2014). Dibutuhkan sebuah pengawasan internal yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik (Putri dan Mahmud, 2015). Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selvi Pratiwi (2019) yang menemukan bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengendalian intern.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.
2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.
3. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.

### **Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian lebih luas, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Intern di Indonesia.
3. Periode penelitian selanjutnya lebih dari enam tahun karena periode yang lebih panjang diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah dan Halim. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Hartono, Rudi. 2014. Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemhan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2011. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.

- Kristanto. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi Ukrida*, Volume 9, No.1, Januari 2009- ISSN: 1411-691X.
- Martani dan Zaelani (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1, Edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*.
- Saputro, Eko Adi. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.